

jesp

ISSN 2086-1575
Vol. 6, No. 2, Nopember 2014

Jurnal **Ekonomi &
Studi Pembangunan**

Jurusan Ekonomi Pembangunan
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



um
The Learning
University



ISSN 2086-1575

Jurnal EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN

Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan (JESP) terbit dua kali setahun memuat artikel hasil pemikiran filosofis, konseptual, teoritis, telaah kritis (*critical review*), dan penelitian di bidang ekonomi pembangunan (*development economics*) dan pembangunan ekonomi (*economic development*).

Ketua Penyunting

Dr. Hari Wahyono, M.Pd

Wakil Ketua Penyunting

Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si

Penyunting Pelaksana

Dr. Mit Witjaksono, MS.Ed

Dr. Sugeng Hadi Utomo, M.S

Dr. Nasikh, SE, M.P., M.Pd

Dr. Grisvia Agustin, S.E., M.Sc

Pelaksana Administrasi

Dian Rachmawati, S.E., M. Pd

Januar Kustiandi, S. Pd, M. Pd

Alamat Redaksi/TU

Jurusan Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (FE UM)

Jl. Semarang 5. Malang 65145. Gedung E3 Lantai 2

Tlp/Fax (0341) 585-911

E-mail: ekonomi_um@yahoo.com, mitrojoyo@gmail.com, imm_mkl@yahoo.com

Site: www.fe.um.ac.id

Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan (JESP) dikelola oleh Jurusan Ekonomi Pembangunan.

Diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang (FE UM).

Dekan: Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed, M.Si.

Pembantu Dekan I: Dr. Mit Witjaksono, MS.Ed.

Pembantu Dekan II: Dr. Tuhardjo, S.E., M.Si.Ak.

Pembantu Dekan III: Drs. Djoko Dwi Kusumayanto, M.Si.

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan: Dr. Sri Umi Mintarti, S.E., M.P,Ak

Naskah artikel yang disumbangkan kepada JESP harus mengikuti aturan dalam *Petunjuk bagi Kontributor JESP* yang dilampirkan pada setiap nomor penerbitan.

Isi artikel beserta akibat yang ditimbulkan oleh artikel itu menjadi tanggungjawab penuh penulisnya (kontributor).

DAFTAR ISI

EDITORIAL

Pengantar	iii
Tentang Nomor Ini	v
Daftar Isi	v

ARTIKEL

Kebebasan Ekonomi di Indonesia <i>Dwi Wulandari</i>	114
--	-----

PENELITIAN

Faktor Penyebab dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menghapus Kemiskinan <i>Juli Panglima Saragih</i>	135
Analisis Disparitas Regional dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Kota Batu Tahun 2002-2012) <i>Alfiana Mauliddiyah</i>	151
Analisis Pengaruh IPM, Pengeluaran Pemerintah Daerah, dan Umk Terhadap Posisi Perekonomian Daerah (Studi Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur) <i>Ida Farida A. Bernadina</i>	159
Analisis Strategi Pengrajin Kulit dalam Mengembangkan Usaha (Studi Kasus Di Sentra Industri Kerajinan Kulit Kelurahan Selosari Magetan) <i>Rudini Hadinata</i>	168
Migrasi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Menggunakan Cost Benefit Analysis (Studi di Kabupaten Malang) <i>Mohammad Rizal</i>	178
Analisis Efisiensi Belanja Daerah di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan) <i>Neneng Erlina Indriati</i>	188
Studi Pada Program Kemitraan Perum Perikanan Indonesia (Perindo) terhadap Masyarakat Pesisir Pantai Yang Bermata Pencaharian Nelayan <i>Wahyu Eko Sasmito</i>	199

**Analisis Pemetaan Potensi Rawan Pangan dan Arah Kebijakan
(Studi Kasus pada Jabung Kabupaten Malang)**

*Siti Muslihah
Sugeng Hadi Utomo
Hadi Sumarsono*

207

**Analisis Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Usaha
Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Malang
(Studi Kasus Kecamatan Poncokusumo)**

Lia Sunfianah & Agung Haryono

226

TINJAUAN BUKU

Ekonomi Makro: Pengantar Ilmu Ekonomi No.2

Ni'matul Istiqomah

236

KEBEBASAN EKONOMI DI INDONESIA

Dwi Wulandari

Abstract

The Indonesian economy continues to be considered “mostly unfree” due to the lack of progress in other critical areas of economic freedom. Indonesia has lagged in promoting the effective rule of law. The judicial system remains vulnerable to political interference, and property rights are not strongly protected. Despite some progress, lingering corruption continues to undermine enforcement of the rule of law and hampers the realization of Indonesia’s full growth potential. Over the 20-year history of the Index, Indonesia has advanced its economic freedom score by modest overall score. This modest overall score increase has been relatively broad-based, facilitated by improvements in six of the 10 economic freedoms including trade freedom, freedom from corruption, and fiscal freedom, each of which gained 10 points or more.

Keywords: *Economic freedom, Freedom from corruption, trade freedom, fiscal freedom, monetary freedom, business freedom*

Pendahuluan

Pernyataan paling terkenal tentang kebebasan ekonomi dinyatakan sekitar 250 tahun yang lalu di buku *The Wealth of Nations*. Ketika Adam Smith menulis “*It is not from the benevolence of the butcher, the brewer or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest*”, saat itu dia sedang membicarakan kebebasan ekonomi. Tetapi sampai 25 tahun yang lalu kebebasan ekonomi hanyalah konsep intuitif, tidak bisa diukur dan tidak memiliki definisi yang jelas.

Michael Walker, direktur eksekutif dari Fraser Institute memahami adanya *gap* dalam ilmu pengetahuan pada tahun 1984. Sejak itu dimulailah proyek penelitian untuk mendefinisikan dan mengukur kebebasan ekonomi. Melalui diskusi-

diskusi, munculah definisi kebebasan ekonomi.

Kebebasan ekonomi adalah kemampuan individu, keluarga dan bisnis untuk membuat keputusan ekonomi mereka sendiri, bebas dari tekanan. Membuat pengukuran yang obyektif dari kebebasan ekonomi bukan hal yang mudah. Akhirnya model komprehensif pertama dibuat oleh James Gwartney, Robert A. Lawson dan Walter E. Block dari Heritage Foundation dan Wall Street Journal pada 1995.

Pendekatan yang digunakan pada indeks ini mirip dengan tulisan Adam Smith, *The Wealth of Nations* yang menyatakan bahwa “*institusi dasar yang melindungi kebebasan individu untuk mengejar tujuan ekonomisnya akan menghasilkan kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakat yang lebih luas*”.

Alamat korespondensi:

Dwi Wulandari, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang

E-mail: wulan501@yahoo.com

Mereka mengukur tingkat kebebasan ekonomi dari 189 negara. Indeks ini meliputi sepuluh komponen yaitu kebebasan berbisnis, kebebasan perdagangan, kebebasan fiskal, ukuran pemerintah, kebebasan moneter, kebebasan investasi, kebebasan finansial, hak milik (*property rights*), kebebasan dari korupsi, dan kebebasan tenaga kerja. Kesepuluh faktor ini dirata-rata menjadi skor total. Setiap unsur kebebasan dinilai dengan skala 0-100 dimana 100 menunjukkan kebebasan maksimal. Sejak indeks ini diperkenalkan, Hongkong telah menjadi nomor satu dalam kebebasan ekonomi. Definisi indeks kebebasan ekonomi adalah bentuk tertinggi dari kebebasan ekonomi, menghasilkan hak absolut kepemilikan, kebebasan pergerakan tenaga kerja, modal, barang dan tidak adanya batasan kebebasan ekonomi diluar yang dibutuhkan untuk melindungi warga negara dan menjamin kebebasan itu sendiri. Indeks ini sangat erat kaitannya dengan aspek institusional di suatu negara.

Kajian Teori

Indeks kebebasan ekonomi adalah ukuran rata-rata sederhana dari sepuluh kebebasan individu dan setiap ukuran bersifat vital terhadap pengembangan pribadi dan kesejahteraan nasional. Selama berabad-abad filsuf besar seperti Locke dan Montesquieu telah mengerti hak kepemilikan dasar

sebagai benteng bagi orang yang merdeka.

Dari waktu ke waktu, ahli dan praktisi juga mengenali pilar kemerdekaan ekonomi yang lain termasuk juga perdagangan bebas, hak investasi dan kebebasan tenaga kerja. Sebagai penelitian pertama tentang kebebasan ekonomi yang pernah dipublikasikan, indeks kebebasan ekonomi 1995 mendefinisikan metode untuk mengukur dan meranking tempat-tempat yang sangat berbeda misalnya Hongkong dan Korea Utara. Beberapa bagian dari sepuluh kebebasan mempunyai hakikat eksternal untuk mengukur sejauh mana keterbukaan ekonomi terhadap investasi dan perdagangan. Sebagian besar bersifat internal untuk mengukur kebebasan individu untuk menggunakan tenaganya atau uangnya tanpa hambatan. Sejak tahun 1995, indeks ini telah berkembang dan disempurnakan sejalan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan. Tiap penelitian di negara-negara yang berbeda menawarkan kontribusi unik yang membantu pengukuran.

Kebebasan ekonomi adalah bagian dari kebebasan yang memperhatikan masalah otonomi material dari individu dalam hubungannya dengan negara dan grup terorganisir lainnya. Individu yang bebas secara ekonomi adalah individu yang memiliki kontrol penuh terhadap tenaga kerja dan propertinya. Komponen ekonomi dari kemerdekaan manusia akan

berhubungan dan mungkin adalah kondisi yang diperlukan untuk kebebasan politik dan juga merupakan tujuan yang berharga.

Penulis indeks melihat kebebasan sebagai konsep yang positif, memahami definisi tradisional sebagai tidak adanya campur tangan atau hambatan dari pemerintah tetapi juga harus memasukkan kebebasan yang berbeda dari anarki. Pemerintah adalah institusi dasar untuk menciptakan perlindungan dasar sehingga hak ekonomi positif seperti kepemilikan dan kontrak diberikan secara sosial sama juga dengan pembelaan individu melawan kecenderungan destruktif lainnya.

Definisi kebebasan ekonomi memasukkan semua kemerdekaan dan hak produksi, konsumsi dan distribusi barang dan jasa. Bentuk tertinggi dari kebebasan ekonomi menyediakan hak absolut kepemilikan, kebebasan pergerakan tenaga kerja, modal dan barang dan tidak adanya tekanan atau hambatan terhadap kemerdekaan ekonomi diluar dari hal-hal yang diperlukan bagi warga negara untuk melindungi dan menjaga kemerdekaan itu sendiri.

Dengan kata lain, individu bebas bekerja, memproduksi, berkonsumsi dan berinvestasi dengan cara yang mereka inginkan dan kebebasan ini dilindungi dan tidak dihambat oleh negara. Semua tindakan pemerintah dianggap sebagai paksaan. Paksaan minimal penting bagi masyarakat untuk

membela diri mereka mendukung evolusi dari masyarakat dan menikmati hasil kerja mereka. Contohnya warga membayar pajak untuk menghasilkan perlindungan bagi warga dan hak kepemilikan. Selain itu barang publik dapat disediakan dengan lebih baik oleh pemerintah daripada swasta. Selain itu ada kepolisian untuk menjaga hak kepemilikan, otoritas moneter untuk mengatur peredaran uang dan hukum untuk mengatur kontrak pihak-pihak yang berkepentingan. Ketika campur tangan pemerintah naik diatas tingkat minimal, akan mengurangi kebebasan dan yang pertama kali terpengaruh adalah kebebasan ekonomi. Secara logis, meningkatnya kekuasaan negara akan membutuhkan dana yang akan diambil dari rakyat. Dalam sejarah, pemerintah telah menetapkan batasan dalam aktivitas ekonomi. Membatasi pilihan ekonomi akan mengganggu produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Adanya kontrol harga adalah contoh dan dampak dari campur tangan pemerintah karena gangguan ini adalah gangguan pada permintaan dan penawaran

Beberapa penelitian terdahulu misalnya oleh Li (2002) menemukan bahwa negara-negara berkembang yang memiliki kebebasan ekonomi lebih tinggi dan perlindungan yang lebih kuat terhadap pemegang saham, memiliki kapitalisasi pasar saham yang lebih tinggi. Keterbukaan terhadap perdagangan juga berpengaruh kondusif terhadap pertumbuhan pasar saham. La Porta

(1997) menemukan bahwa negara yang memiliki perlindungan hukum yang kuat terhadap investor (salah satu komponen dalam indeks kebebasan ekonomi), memiliki pasar saham yang lebih besar dan kuat. Levine dan Zervos (1998), menyimpulkan bahwa kapitalisasi pasar modal menjadi semakin besar seiring dengan liberalisasi pasar modal di suatu negara. Perotti dan Van Oijen (2001) menemukan bahwa privatisasi di Negara berkembang mengurangi resiko politis dan meningkatkan return saham. Sedangkan Stocker (2005) menemukan bahwa semakin tinggi tingkat kebebasan ekonomi di suatu negara, akan semakin tinggi pula return saham di negara tersebut.

Begitu juga kebebasan finansial yang melihat regulasi pemerintah dalam jasa-jasa keuangan di suatu negara akan sangat berpengaruh pada variabel-variabel moneter di negara tersebut. Banalan (2001) menemukan bahwa negara dengan kebebasan ekonomi tinggi mengadopsi struktur yang memicu inflasi yang lebih rendah.

Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam pengukuran indeks kebebasan ekonomi adalah sebagai berikut.

1. Kebebasan bisnis merupakan ukuran kuantitatif terhadap kemampuan untuk memulai, mengoperasikan dan menutup bisnis/usaha yang menunjukkan aturan dan efisiensi pemerintah dalam proses regulasinya. Hal ini

terutama berkaitan dengan pembukaan bisnis baru. Di Amerika Serikat prosedur untuk membuka bisnis baru adalah semudah mengeposkan formulir pendaftaran dengan biaya minimal. Di Hongkong, mendirikan bisnis hanya dengan mengisi form tunggal dan prosesnya bisa diselesaikan dalam hitungan jam. Di India atau negara-negara Amerika Selatan, proses mendapatkan lisensi bisnis membutuhkan perjalanan ke kantor pemerintah berkali-kali dan membutuhkan waktu satu tahun atau lebih. Data diambil dari *World Bank's Doing Business* meliputi memulai bisnis (jumlah prosedur), memulai bisnis (waktu/hari), memulai bisnis (biaya(sebagai prosentase dari pendapatan perkapita)), modal minimum untuk memulai bisnis (sebagai prosentase dari pendapatan perkapita), mendapatkan ijin (jumlah prosedur), mendapatkan ijin (waktu/hari), biaya untuk mendapatkan ijin (sebagai prosentase dari pendapatan perkapita), waktu untuk menutup bisnis/usaha, biaya untuk menutup bisnis (% dari *estate*), *recovery rate (cents on the dollar)* merupakan fungsi dari waktu dan biaya. Penghitungannya adalah berdasarkan rasio data negara-negara untuk tiap komponen relatif terhadap rata-rata dunia dikalikan 50. Misalnya secara rata-rata dunia ada 18,89

prosedur untuk menutup bisnis. Prosedur yang ada di Norwegia berjumlah 14 maka rasionya adalah 1,349 lalu dikalikan 50, hasilnya adalah 67,4%.

2. Kebebasan perdagangan adalah ukuran dari tidak adanya hambatan tarif dan non tarif (NTB) yang mempengaruhi impor dan ekspor barang dan jasa yang dihitung dari tingkat tarif rata-rata tertimbang dan hambatan non tarif. Data diperoleh dari *World Bank*. Hambatan perdagangan dapat berbentuk pajak impor dan ekspor (yang dikenal dengan tarif), kuota dan hambatan regulasi. Seberapa besar pemerintah membatasi akses dan aliran *foreign commerce* yang dapat memiliki dampak langsung terhadap kemampuan individu untuk mencapai tujuan ekonomi mereka. Tarif akan meningkatkan harga yang dibayar oleh konsumen lokal terhadap barang impor dan distorsi harga ini akan merubah insentif, sering menarik produsen untuk tidak ber-spesialisasi pada beberapa barang dan pada barang-barang yang diblokir. Dengan mempengaruhi keunggulan komparatif, pembatasan perdagangan akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Tarif juga akan menaikkan harga dan akan membuat masyarakat lokal lebih miskin. Dalam banyak kasus, pembatasan perdagangan membuat produk dan jasa

berteknologi tinggi tidak dapat terjangkau oleh masyarakat lokal dan akan membatasi pengembangan produktif mereka sendiri. Skor kebebasan perdagangan adalah berdasarkan dua input yaitu tarif perdagangan (rata-rata tertimbang) dan hambatan non tarif. Impor berbeda yang memasuki suatu negara seringkali menghadapi tarif yang berbeda. Tarif rata-rata tertimbang menggunakan timbangan untuk tiap tarif berdasar dari bagian impor untuk tiap barang. Ini dihitung dengan membagi pendapatan tarif total suatu negara dengan nilai impor total. Tarif minimum adalah 0, sedangkan tarif maksimum adalah 50%. Penalti NTB kemudian dikurangkan dari skor dasar. Penalti 5, 10, 15, 20% mengikuti skala dibawah ini:

- Dua puluh persen: NTB ada secara ekstensif pada banyak barang dan jasa dan menghambat secara signifikan perdagangan internasional.
- Lima belas persen: NTB tersebar pada banyak barang dan jasa dan menghambat sebagian besar perdagangan internasional potensial
- Sepuluh persen: NTB digunakan untuk melindungi barang dan jasa tertentu dan menghambat beberapa perdagangan internasional
- Lima persen: NTB tidak banyak, melindungi beberapa

barang dan jasa dan memiliki dampak yang sangat terbatas pada perdagangan internasional

- Nol persen: NTB tidak digunakan sebagai alat untuk membatasi perdagangan internasional

Seberapa jauh penggunaan NTB pada rezim kebijakan perdagangan suatu negara ditentukan dengan menggunakan informasi kualitatif maupun kuantitatif. Aturan pembatasan yang menghambat perdagangan bervariasi luas dan kadang *overlapping* dan bergeser, membuat sulit menilai kompleksitasnya. Kategori NTB yang masuk pada penalti:

- a. Pembatasan kuantitas: kuota impor, pembatasan ekspor, *Voluntary Export Restraints*, embargo dan pembatasan ekspor impor, *countertrade*
- b. Pembatasan harga: pajak anti dumping, *countervailing duties*, pajak pabean, kuota bertarif
- c. Pembatasan peraturan: lisensi, konten domestik, persyaratan campuran, aturan keselamatan dan standar industri, *packaging*, *labelling*, regulasi *trademark*, aturan iklan dan media
- d. Pembatasan investasi: pertukaran dan kontrol keuangan lain
- e. Pembatasan pabean: peraturan deposit di depan, prosedur penilaian pabean, prosedur klasifikasi pabean, prosedur ijin pabean

- f. Intervensi langsung pemerintah: subsidi dan bantuan-bantuan lain, kebijakan industrial pemerintah, pengukuran pengembangan regional, penelitian yang didanai pemerintah, kebijakan teknologi lain, pajak nasional, jaminan asuransi, kebijakan persaingan, kebijakan imigrasi, *government procurement policies*, perdagangan negara bagian, monopoli pemerintah, *franchise* eksklusif
3. Kebebasan fiskal adalah ukuran dari beban pemerintah dari sisi penerimaan. Diukur berdasar tiga faktor yaitu tarif pajak tertinggi pada pendapatan individu, tarif pajak tertinggi pada pendapatan perusahaan dan pendapatan pajak total sebagai prosentase dari GDP. Pemerintah dapat menerapkan beban fiskal terhadap aktivitas ekonomi dengan menciptakan pendapatan untuk pemerintah sendiri, terutama melalui perpajakan dan juga melalui hutang yang harus dibayar melalui pajak. Kebebasan fiskal adalah ukuran kuantitatif dari beban-beban ini dan pajak yang lebih rendah membuat tingkat kebebasan fiskal lebih tinggi. Metodologi indeks ini meliputi tingkat pajak pada pendapatan individu dan perusahaan dan total pendapatan pajak sebagai prosentase dari GDP. Tingkat pajak marginal yang diterapkan pada individu akan berdampak pada harga yang dibayar untuk menyediakan *entrepreneurial venture*. Yang

tersisa setelah dikurangi pajak adalah *reward* terhadap usaha itu. Semakin tinggi harga atau usaha *entrepreneurship*, maka semakin rendah *reward* nya dan semakin sedikit usaha-usaha ini dilakukan. Tingkat pajak yang semakin tinggi akan mempengaruhi kemampuan individu untuk mengejar tujuan mereka di pasar. Meskipun tingkat pajak individu dan perusahaan penting untuk kebebasan ekonomi, mereka bukan ukuran komprehensif dari beban pajak. Pertama karena tidak memasukkan pajak penjualan, tarif, *value added tax*. Salah satu cara memahami pajak adalah menghitung pendapatan pemerintah total dari semua pajak sebagai prosentase dari GDP total. Kebebasan fiskal dihitung dari tiga komponen kuantitatif dengan ukuran yang setara yaitu tingkat pajak tertinggi pada pendapatan individu, tingkat pajak tertinggi pada pendapatan perusahaan, total pendapatan pajak sebagai prosentase dari GDP. Dalam memberikan skor, tiap variabel ditimbang dengan nilai yang sama (masing-masing 1/3). Timbangan yang setara memungkinkan suatu negara untuk mendapat skor 67% berdasar dua komponen meskipun satu komponen bernilai nol. Ekonomi keuangan publik tidak ambigu pada efek pajak dan dapat menjelaskannya dengan

menggunakan penawaran dan permintaan sederhana. Peningkatan pajak dua kali lipat akan meningkatkan biaya ekonomi sebesar empat kali lipat terhadap masyarakat karena hilangnya aktivitas pasar. Ini disebut *deadweight loss* karena bukan nilai yang didapat oleh pemerintah tetapi hancurnya kesejahteraan. Ini terjadi karena desakan harga yang disebabkan oleh pajak, memisahkan penawaran dan permintaan optimal dan mengurangi kuantitas barang yang diperdagangkan. Dalam kondisi ekstrim, meningkatnya pajak akan menurunkan pendapatan pajak itu sendiri seperti ditunjukkan oleh kurva Laffer. Maka dari itu skor untuk kebebasan fiskal dikalkulasi dengan fungsi kuadrat.

4. Ukuran pemerintah. Komponen ini mempertimbangkan pengeluaran pemerintah sebagai prosentase dari GDP. Data diambil dari publikasi resmi pemerintah di suatu negara. Beban dari pemerintah yang berlebihan adalah isu pokok dalam kebebasan ekonomi baik dari segi menghasilkan pendapatan (lihat kebebasan fiskal) dan pengeluaran. Faktor ini menghitung tingkat pengeluaran pemerintah sebagai prosentase dari GDP. Pengeluaran pemerintah termasuk konsumsi dan transfer adalah komponen skor ini karena

kualitas dan ketersediaan data yang tidak konsisten (data tentang pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan yang dimiliki oleh negara), maka variabel ini tidak dipakai lagi dan skor tahun-tahun lalu disesuaikan untuk merefleksikan perbaikan metodologi ini. Pengeluaran pemerintah sering dijustifikasi sebagai barang publik yang lebih efisien apabila disediakan oleh negara daripada oleh pasar. Ada juga justifikasi untuk memperbaiki kegagalan pasar melalui tindakan pemerintah. Ekonom juga mengenali kegagalan sistemik yang lain dimana negara menjadi tidak efisien, birokratis dan merusak produktivitas. Pengeluaran pemerintah bersaing dengan swasta dan mengganggu harga pasar dengan menstimulasi permintaan dan secara potensial mengalihkan sumber daya melalui efek *crowding out*. Dalam kasus yang ekstrim pemerintah dapat memaksa meminta barang dan modal di pasar, meningkatkan suku bunga dan inflasi. Distorsi di pasar muncul ketika tujuan pengeluaran pemerintah adalah untuk mendapatkan sumber daya untuk tujuan pemerintah sendiri (konsumsi pemerintah) atau pembayaran transfer. Dipahami bahwa beberapa pengeluaran pemerintah memang mewakili barang publik dan sesungguhnya mengimplikasikan tingkat ideal

diatas 0. Bagaimanapun juga mengidentifikasi tingkat ideal tersebut tampak terlalu sewenang-wenang, statis dan sulit diterapkan secara umum. Karena alasan inilah, metodologi memberlakukan pengeluaran pemerintah sama dengan 0 sebagai *benchmark*. Pemerintah yang tidak memiliki barang publik akan dipenalti oleh nilai yang lebih rendah pada faktor lain (hak kepemilikan dan kebebasan finansial). Skala untuk memberikan skor terhadap ukuran pemerintah bersifat non linier yang artinya bahwa pengeluaran pemerintah yang mendekati 0 dipenalti, sedangkan pengeluaran pemerintah yang melebihi 30% dari GDP menerima skor yang lebih buruk dengan rumus kuadrat (dua kali lipat pengeluaran akan mengurangi kebebasan empat kali lipat), jadi hanya pemerintah yang besar yang akan menerima skor yang sangat rendah. Ketertarikan pemerintah terhadap sumber daya swasta mempengaruhi kebebasan dan pertumbuhan ekonomi. Bahkan bila perekonomian yang diatur oleh negara memperoleh pertumbuhan tinggi melalui pengeluaran yang besar, hal tersebut akan mengurangi kebebasan dalam prosesnya dan dapat merusak potensi pertumbuhan jangka panjang suatu negara.

5. Kebebasan Moneter mengkom-
binasikan ukuran stabilitas harga
dengan pengukuran kontrol
harga. Baik inflasi maupun
kontrol harga akan mendistorsi
aktivitas pasar. Penilaiannya
berdasar pada dua faktor yaitu
tingkat inflasi rata-rata
tertimbang dan kontrol harga.
Data diambil dari *International
Monetary Fund*. Kebebasan
moneter bagi ekonomi pasar,
sama dengan kebebasan
berbicara dalam demokrasi.
Orang-orang bebas membutuh-
kan mata uang yang stabil
sebagai alat tukar dan penyimpan
nilai dan tanpa kebebasan
moneter, hal ini sulit dalam
jangka panjang. Mata uang suatu
negara dikontrol oleh kebijakan
moneter pemerintah. Dengan
kebijakan moneter untuk
menjaga stabilitas, orang dapat
bergantung pada harga pasar
untuk masa depan. Investasi,
tabungan dan rencana-rencana
jangka panjang lebih mudah
untuk dibuat dan individu
menikmati kebebasan ekonomi
yang lebih tinggi. Inflasi tidak
hanya mengganggu kemakmuran
seperti pajak yang tidak nampak
tapi juga mendistorsi biaya,
meningkatkan biaya bisnis. Tidak
ada satu teori khusus yang
diterima untuk institusi moneter
yang tepat untuk masyarakat
yang bebas. Pada suatu waktu,
standar emas menikmati
dukungan yang luas tapi
sekarang tidak lagi. Karakter dari
teori moneter saat ini adalah
inflasi yang rendah dan bank
sentral yang independen. Ada
konsensus kuat antar ekonom
bahwa kontrol harga
menggangu efisiensi pasar dan
menghitung inflasi ditengah
kontrol harga ini adalah tidak
mungkin karena sinyal harga
tidak lagi sesuai dengan
permintaan dan penawaran.
6. Kebebasan Investasi melihat
kebijakan suatu negara terhadap
aliran investasi modal (dalam dan
luar negeri) dengan tujuan untuk
menentukan iklim investasi
keseluruhan. Pertanyaan meliputi
bagaimanakah hukum dan
prosedur investasi asing, apakah
pemerintah memacu investasi
asing melalui perlakuan yang adil
dan setara bagi investor, apakah
ada pembatasan akses valuta
asing, apakah perusahaan asing
diperlakukan sama dengan
perusahaan domestik di mata
hukum, apakah pemerintah
menetapkan batasan pembayaran,
transfer dan transaksi modal dan
apakah industri tertentu tertutup
bagi investasi asing. Pembatasan
terhadap modal asing membatasi
aliran modal dalu membatasi
kebebasan ekonomi. Sebaiknya
pembatasan yang sedikit atau
tidak ada pada investasi asing
meningkatkan kebebasan
ekonomi karena investasi asing
menyediakan dana untuk
ekspansi ekonomi. Secara alami
modal akan mengalir untuk
penggunaan terbaiknya ketika

paling diperlukan dan *returnnya* terbaik. Tindakan pemerintah untuk mengatur aliran modal adalah gangguan untuk kebebasan bagi investor dan orang yang mencari modal. Maka semakin banyak batasan yang diterapkan suatu negara terhadap investor asing dan domestik, semakin rendah tingkat kebebasan ekonominya.

Metodologi: faktor ini melihat kebijakan tiap negara terhadap investasi asing dan juga kebijakannya terhadap aliran modal secara internal untuk menentukan iklim investasi keseluruhan, penulis menilai semua negara dengan rubrik yang sama. Pertanyaan meliputi kode investasi asing yang menunjukkan hukum dan prosedur suatu negara, apakah pemerintah mendukung investasi asing melalui perlakuan investor yang adil dan sama, apakah perusahaan asing diperlakukan sama dengan perusahaan domestik di mata hukum. Apakah ada batasan akses terhadap mata uang asing, apakah pemerintah memberlakukan batasan pembayaran transfer dan transaksi modal dan apakah industri tertentu tertutup bagi investasi asing. Kriteria yang digunakan sebagai berikut:

- Seratus persen: investasi asing didukung dan diperlakukan sama seperti investasi domestik dengan kode investasi asing yang sederhana

dan transparan dan birokrasi yang profesional dan efisien. Tidak ada batasan pada sektor yang terkait dengan keamanan nasional atau *real estate*. Tidak ada pengambil alihan yang diijinkan. Baik penduduk maupun bukan penduduk memiliki akses terhadap mata uang asing dan bisa melakukan pembayaran internasional. Transfer atau transaksi modal tidak menghadapi pembatasan.

- Sembilan puluh persen: sama dengan diatas dengan pengecualian, ada batasan sangat sedikit dalam investasi asing pada sektor yang terkait dengan keamanan nasional. Ada garansi legal melawan pengambil alihan kepemilikan. Transfer atau transaksi modal hampir tanpa batasan.
- Delapan puluh persen: sama dengan diatas dengan pengecualian kode investasi asing yang transparan ada halangan informal yang lain. Ada sedikit batasan pada mata uang asing, ada sedikit pembatasan pada transfer atau transaksi modal
- Tujuh puluh persen: sama dengan diatas dengan pengecualian ada batasan investasi asing melalui peraturan umum dalam beberapa sektor misalnya peralatan, sumberdaya alam atau keamanan nasional. Ada

sedikit batasan dalam akses mata uang asing atau kemampuan untuk melakukan pembayaran internasional.

- Enam puluh persen: sama seperti diatas dengan pengecualian investasi secara umum didukung tetapi mungkin tidak mendapat perlakuan yang sama di beberapa sektor. Kode investasi asing tidak transparan dan menghadapi hambatan birokratis. Pengambil alihan properti sangat tidak disukai dan pemerintah menjamin kompensasi transfer atau transaksi modal dibatasi beberapa aturan.
 - Lima puluh persen: sama dengan diatas dengan pengecualian investor asing menghadapi pembatasan dalam kemampuan untuk membeli *real estate*. Semua investor menghadapi halangan birokrasi dan korupsi. Penduduk dan bukan penduduk menghadapi beberapa batasan terhadap akses mata uang asing atau kemampuan mereka untuk melakukan pembayaran internasional. Transfer atau transaksi modal adalah subyek dari batasan yang nampak atau jelas.
 - Empat puluh persen: sama seperti diatas dengan beberapa pengecualian yaitu investasi asing dibatasi, kode investasi asing bersifat diskriminatif
- dan investasi asing dibatasi pada beberapa sektor, pengambil-alihan properti jarang terjadi. Transfer dan transaksi modal dibatasi oleh batasan yang signifikan.
- Tiga puluh persen: sama seperti diatas dengan pengecualian investasi asing dibatasi secara signifikan, kode investasi asing bersifat diskriminatif dan investasi asing hanya boleh membeli *real estate* hanya dalam kondisi terbatas. Semua investor menghadapi hambatan birokrasi dan korupsi. Penduduk dan bukan penduduk menghadapi pembatasan ketat terhadap akses valuta asing, dan pemerintah menetapkan banyak kontrol pada pembayaran internasional
 - Dua puluh persen: sama seperti diatas dengan pengecualian investasi asing tidak didukung dan dilarang di banyak sektor, kode investasi asing bersifat diskriminatif dan proses persetujuan bersifat buram dan banyak korupsi. Beberapa sektor terbuka terhadap investasi asing. Pengambil alihan properti adalah hal yang biasa. Pemerintah menetapkan kontrol ekstensif terhadap pembayaran internasional, transfer dan transaksi modal.
 - Sepuluh persen: sama seperti diatas dengan pengecualian

sebagai investor asing tidak boleh membeli *real estate*, pemerintah mengontrol atau melarang sebagian besar pembayaran internasional, transfer dan transaksi modal.

- Nol persen: sama seperti diatas dengan pengecualian investasi asing dilarang, orang asing tidak boleh memiliki *real estate* dan pemerintah melarang pembayaran internasional, transfer dan transaksi modal
7. Kebebasan Finansial adalah ukuran kepemilikan saham perbankan dan juga mengukur independensi dari kontrol pemerintah. Kepemilikan negara terhadap bank dan institusi keuangan lainnya akan menimbulkan inefisiensi yang akan mengurangi persaingan dan menurunkan tingkat *service* yang tersedia. Komponen perhitungannya meliputi seberapa besar aturan pemerintah dalam jasa-jasa keuangan, seberapa besar intervensi pemerintah terhadap bank dan jasa-jasa keuangan lainnya, tingkat kesulitan membuka dan mengoperasikan perusahaan jasa-jasa keuangan (baik individu domestik dan asing) dan pengaruh pemerintah terhadap alokasi kredit. Di sebagian besar negara, banyak yang menyediakan jasa finansial yang penting yang memfasilitasi pertumbuhan

ekonomi. Mereka meminjamkan uang untuk memulai bisnis, membeli rumah dan menjamin kredit untuk pembelian barang konsumsi dan memberikan tempat bagi nasabah untuk menyimpan tabungannya. Kontrol bank yang lebih besar oleh pemerintah adalah ancaman terhadap fungsi-fungsi ini karena campur tangan pemerintah dapat menimbulkan inefisiensi dan korupsi. Aturan bank yang berat mengurangi kesempatan dan membatasi kebebasan ekonomi, maka semakin besar hambatan pemerintah terhadap sektor perbankan, kebebasan ekonomi akan semakin rendah. Harus dicatat bahwa hampir semua negara melakukan pengawasan kehati-hatian untuk bank dan jasa finansial lainnya. Pengawasan ini mempunyai dua tujuan yaitu memastikan keamanan sistem finansial dan memastikan bahwa perusahaan jasa finansial memenuhi standar tanggung jawabnya. Tugas ada di tangan pemerintah untuk menegakkan kontrak dan melindungi warganya dari penipuan dengan mensyaratkan institusi finansial untuk mempublikasikan laporan finansial dan data yang relevan yang diverifikasi oleh auditor yang independen, sehingga peminjam, penabung

dan pelaku finansial dapat membuat pilihan berdasarkan informasi ini. Dalam lingkungan perbankan yang bebas, pasar adalah sumber utama perlindungan melalui institusi, sebagai auditor yang independen dan memberikan jasa informasi. Beberapa kekeliruan dibedakan dari hal-hal yang memberatkan atau peraturan pemerintah yang mengganggu, atau kepemilikan pemerintah terhadap bank yang mengganggu ketentuan jasa finansial terhadap konsumen. Intervensi pemerintah di pasar dan bukan pasar itu sendirilah yang membatasi kebebasan ekonomi dan menyebabkan skor suatu negara untuk faktor ini lebih buruk daripada yang seharusnya. Secara meningkat, peranan sentral yang dimainkan oleh bank dilengkapi oleh jasa finansial lain yang menawarkan alat alternatif untuk meningkatkan modal atau mendiversifikasi resiko. Sebagai hasilnya, penulis mengambil jasa finansial non bank, misalnya asuransi dan sekuritas, menjadi pertimbangan ketika menilai faktor ini, dengan sistem perbankan, di luar ketetapan dasar untuk melakukan kewajiban kontrak dan menghindari penipuan, meningkatkan investasi pemerintah di area ini,

mengurangi kebebasan ekonomi dan menghalangi kemampuan jasa finansial non bank berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila pemerintah mencampuri pasar modal, akan mengganggu pilihan jutaan individu dengan mengganggu harga saham, fungsi paling penting dari ekonomi pasar. Pasar modal menghitung dalam basis kontinyu, laba dan rugi yang diharapkan oleh perusahaan yang *go public*. Penghitungan ini penting untuk mengalokasikan sumber daya modal untuk penggunaan dengan nilai tertingginya dan lalu memuaskan keinginan konsumen. Mirip dengan hal tersebut, kepemilikan atau intervensi pemerintah pada sektor asuransi menghilangkan kemampuan penyedia untuk menyediakan layanan dengan harga yang berdasar pada resiko dan kondisi pasar. Metodologi: faktor kebebasan ekonomi menghitung keterbukaan relatif sistem perbankan dan finansial suatu negara. Penulis memberi nilai pada faktor ini dengan menentukan seberapa luas regulasi pemerintah dalam jasa-jasa finansial, seberapa luas campur tangan pemerintah pada sektor perbankan dan jasa finansial lainnya. Kesulitan membuka dan mengoperasikan

perusahaan jasa finansial (baik untuk individu domestik dan asing) dan pengaruh pemerintah dalam alokasi kredit. Penulis menggunakan analisis ini untuk mengembangkan deskripsi tentang iklim finansial suatu negara dan membuat skor antara 0% sampai 100%. Kriteria dibawah ini digunakan untuk menentukan skor suatu negara:

- Seratus persen: tidak ada campur tangan pemerintah, pengawasan bank sentral yang independen dan institusi finansial dibatasi untuk menegakkan kewajiban kontrak dan menghindari penipuan. Kredit dialokasikan atas dasar pasar. Pemerintah tidak memiliki institusi finansial. Institusi finansial bisa terlibat dalam berbagai jasa finansial. Bank bebas untuk menerbitkan aturan yang kompetitif, memperluas kredit dan menerima simpanan dan beroperasi dalam perdagangan mata uang asing. Institusi finansial asing beroperasi dengan bebas dan diperlakukan sama dengan institusi domestik.
- Sembilan puluh persen: campur tangan pemerintah yang minimal. Sama seperti diatas dengan beberapa pengecualian: pengawasan bank sentral yang independen minimal tetapi bisa diperluas lebih dari menegakkan kewajiban kontrak dan menghindari penipuan
- Delapan puluh persen: campur tangan pemerintah yang nominal. Sama seperti diatas dengan pengecualian pengawasan bank sentral yang independen dan aturan langsung yang transparan tetapi diperluas diatas menegakkan kewajiban kontrak dan menghindari penipuan. Kepemilikan pemerintah terhadap institusi finansial adalah bagian kecil dari total asset keseluruhan. Institusi finansial menghadapi hampir tidak ada hambatan dalam kemampuan mereka untuk menawarkan jasa keuangan.
- Tujuh puluh persen: campur tangan pemerintah yang terbatas. Sama seperti diatas dengan pengecualian sebagai berikut alokasi kredit sedikit dipengaruhi oleh pemerintah dan alokasi kredit swasta hampir tidak menghadapi hambatan. Institusi finansial luar negeri menghadapi sedikit hambatan
- Enam puluh persen: campur tangan pemerintah yang signifikan. Sama seperti diatas dengan beberapa pengecualian. Bank sentral tidak independen secara penuh, pengawasan dan regulasi institusi finansial agak memberatkan dan

kemampuannya untuk menegakkan kontrak dan menghindari penipuan tidak cukup. Pemerintah aktif dalam kepemilikan dan kontrol institusi finansial dengan bagian yang signifikan terhadap asset sektor keseluruhan. Kemampuan institusi finansial untuk menawarkan jasa finansial dibatasi oleh beberapa pembatasan

- Lima puluh persen: Campur tangan pemerintah yang dipertimbangkan. Sama seperti diatas dengan beberapa pengecualian. Alokasi kredit dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah dan alokasi kredit swasta menghadapi hambatan yang signifikan. Kemampuan institusi finansial untuk menawarkan jasa keuangan dibatasi secara signifikan. Institusi finansial asing dibatasi oleh beberapa batasan
- Empat puluh persen: campur tangan pemerintah yang kuat. Sama seperti diatas dengan pengecualian bank sentral dipengaruhi oleh pemerintah dan pengawasan dan regulasi institusi finansial berat dan kemampuan untuk menegakkan kontrak dan menghindari penipuan lemah. Pemerintah memiliki secara aktif dan mengontrol institusi finansial dengan saham minoritas yang besar dari asset sektor keseluruhan
- Tiga puluh persen: Campur tangan pemerintah yang ekstensif. Sama seperti diatas dengan beberapa pengecualian. Alokasi kredit secara ekstensif dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah memiliki atau mengontrol aktivitas institusi finansial atau dalam posisi yang dominan. Institusi finansial dibatasi dan pembentukan bank menghadapi hambatan yang signifikan. Institusi finansial asing sangat dibatasi.
- Dua puluh persen: Campur tangan pemerintah yang berat. Sama seperti diatas dengan beberapa pengecualian. Bank Sentral tidak independen dan pengawasan dan regulasi institusi finansial bersifat represif. Institusi finansial asing sangat dibatasi
- Sepuluh persen: Mendekati represif. Sama seperti diatas dengan beberapa pengecualian. Alokasi kredit dikontrol oleh pemerintah. Pembentukan bank dibatasi. Institusi finansial asing dibatasi
- Nol persen: Represif. Sama seperti diatas dengan beberapa pengecualian. Pengawasan dan regulasi didesain untuk menghindari institusi finansial swasta. Institusi finansial swasta dilarang

8. Hak Kepemilikan (*property rights*) adalah penilaian kemampuan individu untuk mengakumulasi kepemilikan pribadi, yang dijamin oleh hukum yang jelas yang didukung oleh negara. Mengukur seberapa jauh hukum negara melindungi hak kepemilikan pribadi dan bagaimana pemerintah menerapkan hukum ini. Juga mengukur apakah ada pengambil alihan kepemilikan individu dan menganalisa independensi hukum dan kemampuan individu dan bisnis untuk menerapkan kontrak. Semakin tinggi perlindungan terhadap kepemilikan, maka semakin tinggi skornya, sebaliknya semakin tinggi kemungkinan pemerintah mengambil alih asset, maka semakin rendah skornya. Kemampuan untuk mengakumulasi kepemilikan swasta adalah kekuatan motivasi dalam perekonomian pasar dan aturan hukum penting untuk berfungsinya ekonomi pasar. Hak kepemilikan yang baik, memberi masyarakat keyakinan untuk melakukan aktivitas komersial, menabung dan membuat rencana jangka panjang karena mereka tahu bahwa pendapatan dan tabungan mereka aman. Faktor ini menilai seberapa luas pemerintah melindungi properti swasta dengan menegakkan hukum dan juga seberapa jauh keamanan kepemilikan swasta. Semakin sedikit perlindungan

terhadap kepemilikan swasta, semakin rendah kebebasan ekonomi dan skor semakin rendah. Metodologi: faktor ini memberikan skor derajat hukum suatu negara dalam melindungi kepemilikan swasta dan bagaimana pemerintah menerapkan hukum, juga menilai apakah ada kemungkinan pengambil alihan kepemilikan swasta dan menganalisa independensi hukum dan ada atau tidaknya korupsi dalam penegakan hukum dan kemampuan individu dan bisnis untuk mematuhi kontrak. Semakin tidak pasti perlindungan hukum terhadap kepemilikan, maka skor akan semakin kecil. Semakin besar kemungkinan pengambil alihan kepemilikan swasta oleh pemerintah, maka skor akan semakin rendah. Penulis memberi nilai tiap negara sesuai kriteria dibawah ini:

- Seratus persen: kepemilikan swasta dijamin oleh pemerintah. Sistem peradilan menegakkan kontrak secara efisien dan cepat. Sistem hukum menghukum mereka yang mengambil alih kepemilikan swasta dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Tidak ada korupsi dan pengambil alihan
- Sembilan puluh persen: kepemilikan dijamin oleh pemerintah. Sistem peradilan menegakkan kontrak secara efisien. Sistem hukum menghukum orang yang

mengambil kepemilikan swasta dengan tidak sah. Hampir tidak ada korupsi dan pengambil-alihan kepemilikan

- Delapan puluh persen: kepemilikan swasta dijamin oleh pemerintah. Sistem peradilan menegakkan kontrak dengan efisien tetapi dengan beberapa penundaan. Korupsi minimal dan pengambilalihan jarang terjadi
- Tujuh puluh persen: kepemilikan swasta dijamin oleh pemerintah. Sistem peradilan sering mengalami penundaan dan ada kekurangan dalam menegakkan kontrak. Korupsi mungkin ada tetapi jarang dan pengambil alihan jarang terjadi
- Enam puluh persen: penegakan hak kepemilikan sering ditunda. Korupsi mungkin terjadi tetapi jarang dan sistem hukum mungkin dipengaruhi oleh pemerintah yang lain. Pengambil alihan jarang terjadi
- Lima puluh persen: sistem peradilan tidak efisien dan sering ditunda. Ada korupsi dan peradilan mungkin dipengaruhi oleh pemerintah. Pengambil alihan dimungkinkan tetapi jarang
- Empat puluh persen: sistem peradilan sangat tidak efisien dan penundaan sangat lama sampai menghalangi penggunaan sistem peradilan. Ada korupsi dan peradilan dipengaruhi oleh pemerintah. Pengambil alihan dimungkinkan
- Tiga puluh persen: kepemilikan dilindungi dengan lemah. Sistem peradilan sangat tidak efisien. Korupsi marak dan peradilan sangat dipengaruhi oleh pemerintah. Pengambil alihan dimungkinkan
- Dua puluh persen: kepemilikan swasta dilindungi dengan lemah. Sistem peradilan sangat tidak efisien dan korup sehingga penyelesaian di luar peradilan dan arbitrase menjadi hal yang biasa. Hak kepemilikan sulit ditegakkan. Korupsi di bidang hukum sangat luas. Pengambilalihan sangat biasa
- Sepuluh persen: kepemilikan swasta jarang dilindungi dan hampir semua kepemilikan dimiliki oleh negara. Negara berada dalam kondisi *chaos* (misalnya karena adanya perang yang sedang berlangsung) sehingga perlindungan kepemilikan hampir tidak bisa ditegakkan. Peradilan sangat korup sehingga kepemilikan tidak dilindungi secara efisien. Pengambil alihan adalah sesuatu yang biasa
- Nol persen: Semua kepemilikan berada di tangan

pemerintah. Orang tidak punya hak untuk menentut orang lain dan tidak punya akses ke pengadilan. Korupsi mewabah

9. Kebebasan dari korupsi. Korupsi mengikis kebebasan ekonomi karena meningkatkan ketidakamanan dan ketidakpastian dalam hubungan ekonomi. Skor untuk komponen ini didapat dari *Transparency International's Corruption Perception Index* yang mengkalkulasi data yang dikumpulkan oleh sepuluh institusi independen yang mengukur keberadaan korupsi (frekuensi atau ukuran penyuapan) pada sektor publik dan politik. Misalnya dari *Africa Development Bank* yang menghitung transparansi, akuntabilitas dan korupsi pada sektor publik, *Bertelsmann Foundation* yang mengajukan pertanyaan tentang sampai sejauh mana hukuman legal atau politik untuk pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan dan sejauh mana pemerintah mampu mengatasi korupsi, *Economic Intelligence Unit* menilai bagaimana prosedur dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, *Freedom House* yang memberikan pertanyaan apakah pemerintah menerapkan usaha-usaha anti korupsi, *Global Insights* dan *Institute for Management Development* serta *World Economic Forum* membahas tentang penyuapan

dan korupsi, *Political and Economic Risk Consultancy* membahas tentang persepsi korupsi publik. Korupsi didefinisikan sebagai ketidakjujuran atau kebusukan. Dalam konteks pemerintahan, korupsi didefinisikan sebagai kegagalan integritas dalam suatu sistem, distorsi dimana individu mendapatkan keuntungan pribadi dari kerugian banyak orang. Korupsi politik adalah bagian yang menyedihkan dari sejarah manusia dan mempunyai banyak bentuk misalnya penyuapan, pemerasan, nepotisme, kronisme, perlindungan, penggelapan dan yang paling sering adalah sogok menyogok dimana pejabat pemerintah mencuri atau mendapatkan keuntungan secara tidak sah dari dana masyarakat. Korupsi menginfeksi semua bagian perekonomian kecuali pasar diijinkan untuk mengembangkan transparansi dan kebijakan yang efektif secara umum, korupsi yang lebih tinggi sama dengan merusak kebebasan ekonomi, meskipun mungkin tidak ada pada kasus yang ekstrim. Robert Barro, ekonom dari Harvard menyatakan bahwa dalam beberapa kondisi, korupsi mungkin disukai oleh penegakan hukum buruk yang jujur. Contohnya, hasilnya mungkin akan lebih buruk apabila regulasi yang menghalangi beberapa aktivitas ekonomi yang berguna ditegakkan secara keseluruhan,

lebih daripada keadaan yang didapat melalui penyupaan. Banyak masyarakat yang menganggap aktivitas seperti *trafficking* obat terlarang adalah tidak sah, tetapi lainnya membatasi kebebasan individu dengan mencabut perlindungan-perindungan hukum pada aktivitas misalnya transportasi swasta dan jasa konstruksi. Peraturan pemerintah atau pembatasan di satu bidang mungkin menciptakan pasar informal di area lain. Contohnya suatu negara dengan hambatan perdagangan yang tinggi mungkin memiliki hukum yang melindungi pasar domestiknya dan menghindari impor barang asing, tetapi hambatan ini menciptakan insentif untuk penyelundupan dan pasar informal untuk barang yang dihambat. Metodologi: faktor ini

berdasar pada transparansi internasional Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang menghitung tingkat korupsi di 152 negara, untuk menentukan skor kebebasan dari korupsi dari negara-negara yang juga terdaftar dalam indeks kebebasan ekonomi. CPI berdasarkan pada 10 skala point dimana skala 10 mengindikasikan korupsi yang sangat kecil dan skor 1 mengindikasikan pemerintah yang sangat korup. Dalam memberi skor kebebasan dari korupsi, penulis mengkonversi tiap data mentah CPI ke skala 10-100 dengan mengalikan skor CPI dengan 10. Contohnya apabila data mentah CPI adalah 5,5, maka skor kebebasan dari korupsinya adalah 55. Untuk negara-negara yang tidak tercantum dalam CPI, kebebasan dari korupsi ditentukan dengan informasi kualitatif dari sumber yang terpercaya secara internasional.

Tahun	Kebebasan Berbisnis	Kebebasan Dari Korupsi	Kebebasan Finansial	Kebebasan Fiskal	Kebebasan Investasi	Kebebasan Moneter	Kebebasan Perdagangan	Ukuran Pemerintah	Hak Kepemilikan
1998	55,0	10,0	50,0	73,1	50,0	70,9	45,0	89,7	50,0
1999	55,0	10,0	50,0	80,0	70,0	71,3	73,0	90,0	50,0
2000	55,0	19,0	50,0	79,9	70,0	70,8	73,0	90,3	50,0
2001	55,0	27,0	50,0	80,1	70,0	71,7	73,0	94,3	50,0
2002	55,0	27,0	30,0	80,0	70,0	73,3	73,0	95,4	50,0
2003	55,0	20,0	30,0	79,7	70,0	49,4	66,0	76,5	50,0
2004	55,0	17,0	30,0	80,4	50,0	56,2	67,2	86,8	30,0
2005	55,0	17,0	30,0	79,4	50,0	72,4	72,6	86,8	30,0
2006	55,0	19,0	30,0	77,5	50,0	74,6	74,6	91,1	30,0
2007	55,0	19,0	30,0	77,5	30,0	68,9	74,2	84,4	30,0
2008	55,0	19,0	30,0	77,5	30,0	71,7	77,2	90,0	30,0
2009	46,6	20,0	30,0	77,3	30,0	73,6	74,6	86,0	30,0
2010	48,2	22,0	40,0	77,5	30,0	70,9	74,0	89,1	30,0
2011	49,0	24,0	40,0	77,4	30,0	68,2	73,0	89,7	30,0
2012	46,7	23,0	40,0	77,5	30,0	71,6	76,4	88,0	30,0
2013	53,1	26,0	40,0	81,9	35,0	70,8	77,9	89,1	30,0

Prosedur itu mempertimbangkan sampai sejauh mana korupsi ada di suatu negara. Semakin tinggi tingkat korupsi maka tingkat kebebasan ekonomi akan semakin rendah.

Meskipun dari tahun ke tahun mengalami kenaikan tetapi kebebasan ekonomi di Indonesia menempati ranking 100 di dunia (Heritage Foundation, 2013). Indonesia masih masuk dalam kategori “mostly unfree”. Permasalahan di Indonesia terutama terjadi karena penegakan hukum yang belum baik, korupsi yang masih tinggi, masih adanya pengaruh politik dalam sistem peradilan dan hak kepemilikan yang tidak dilindungi dengan baik. Korupsi masih menjadi epidemic yang parah di Indonesia, begitu juga penyuapan dan pencucian uang. Membuka bisnis di Indonesia juga masih cukup sulit, membutuhkan waktu satu bulan untuk mengurus ijin pembukaan bisnis di Indonesia. Meskipun sudah banyak membuka peluang investasi asing, dari sisi perdagangan, masih banyak hambatan yang diterapkan oleh Pemerintah di Indonesia. Korupsi mengikis kebebasan ekonomi karena meningkatkan ketidakamanan dan ketidak-pastian dalam hubungan ekonomi. Skor untuk komponen ini didapat dari *Transparency International's Corruption Perception Index*. Korupsi didefinisikan sebagai ketidakjujuran atau kebusukan. Dalam konteks pemerintahan, korupsi didefinisikan sebagai kegagalan integritas dalam suatu

sistem, distorsi dimana individu mendapatkan keuntungan pribadi dari kerugian banyak orang. Korupsi politik adalah bagian yang menyedihkan dari sejarah manusia dan mempunyai banyak bentuk misalnya penyuapan, pemerasan, nepotisme, kronisme, perlindungan, penggelapan dan yang paling sering adalah sogok menyogok dimana pejabat pemerintah mencuri atau mendapatkan keuntungan secara tidak sah dari dana masyarakat. Korupsi menginfeksi semua bagian perekonomian kecuali pasar diijinkan untuk mengembangkan transparansi dan kebijakan yang efektif secara umum, korupsi yang lebih tinggi sama dengan merusak kebebasan ekonomi, meskipun mungkin tidak ada pada kasus yang ekstrim. Robert Barro, ekonom dari Harvard menyatakan bahwa dalam beberapa kondisi, korupsi mungkin disukai oleh penegakan hukum buruk yang jujur. Contohnya, hasilnya mungkin akan lebih buruk apabila regulasi yang menghalangi beberapa aktivitas ekonomi yang berguna ditegakkan secara keseluruhan, lebih daripada keadaan yang didapat melalui penyuapan. Banyak masyarakat yang menganggap aktivitas seperti *trafficking* obat terlarang adalah tidak sah, tetapi lainnya membatasi kebebasan individu dengan mencabut perlindungan-perindungan hukum pada aktivitas misalnya transportasi swasta dan jasa konstruksi. Peraturan pemerintah atau pembatasan di satu bidang mungkin menciptakan pasar informal di area lain. Contohnya

suatu negara dengan hambatan perdagangan yang tinggi mungkin memiliki hukum yang melindungi pasar domestiknya dan menghindari impor barang asing, tetapi hambatan ini menciptakan insentif untuk penyelundupan dan pasar informal untuk barang yang dihambat.

Lee dan Ng (2004) menemukan hubungan empiris antara korupsi dengan penilaian perusahaan oleh pemegang saham. Mereka menggunakan data dari 43 negara untuk mengevaluasi hubungan empiris antara korupsi dengan nilai perusahaan internasional. Mereka menemukan bahwa perusahaan dari negara yang lebih korup berdagang dengan nilai pasar yang lebih rendah. Mereka menemukan bahwa korupsi secara signifikan menurunkan nilai saham. Mereka menyimpulkan bahwa korupsi memiliki konsekuensi ekonomi signifikan terhadap nilai pemegang saham. Salah satu alasan potensial mengapa korupsi mungkin mempengaruhi penilaian saham adalah *corporate governance*. Ketika korupsi meningkat, peraturan melemah dan *corporate governance* memburuk. Ini akan meningkatkan resiko obligasi dan membuat penilaian saham lebih rendah.

Ng dan Qian (2005) meneliti dampak dari korupsi terhadap *corporate governance*. Mereka membangun model yang menunjukkan bahwa *insider* bisa mengambil alih *outsider* apabila dengan adanya penyuapan mengurangi kemungkinan ditangkaptanya *insider*. *Corporate governance*

akan lebih buruk di negara yang lebih korup. Korupsi memiliki dampak yang signifikan pada *corporate governance* dan penilaian perusahaan

Kesimpulan

Meskipun dari tahun ke tahun mengalami kenaikan tetapi kebebasan ekonomi di Indonesia menempati ranking 100 di dunia (Heritage Foundation, 2014). Indonesia masih masuk dalam kategori “*mostly unfree*”. Permasalahan di Indonesia terutama terjadi karena penegakan hukum yang belum baik, korupsi yang masih tinggi, masih adanya pengaruh politik dalam sistem peradilan dan hak kepemilikan yang tidak dilindungi dengan baik. Korupsi masih menjadi epidemic yang parah di Indonesia, begitu juga penyuapan dan pencucian uang. Membuka bisnis di Indonesia juga masih cukup sulit, membutuhkan waktu satu bulan untuk mengurus ijin pembukaan bisnis di Indonesia. Meskipun sudah banyak membuka peluang investasi asing, dari sisi perdagangan, masih banyak hambatan yang diterapkan oleh Pemerintah di Indonesia.

Daftar Rujukan

Atmadja, A. 2004. The Granger Causality Tests For The Five ASEAN Countries Stock Markets And Macroeconomic Variables During And Post The 1997 Asian Financial Crisis. *Jurnal Universitas Petra*

- Ciocchini, F., Durbin E. and Ng, D.T. 2003. Does Corruption Increase Emerging Market Bond Spread? *Journal of Economics and Business* vol 55
- Demirguc, K. 1998. Law, Finance and Firm Growth. *Journal of Finance* vol 53
- Gelos, R. G and Wei, S. J. 2006. Transparency and International Investor Behavior. *IMF Working Paper 02/174*
- Gwartney, J. and Lawson, R. 2004. *Economic Freedom of the World: 2004 Annual Report*. Vancouver, B.C.: Fraser Institute.
- Hale, G., Razin, A. and Tong H. 2006. Institutional Weakness and Stock Price Volatility. *Review of Economic Studies*
- La Porta R, Lopez De Silanes F, Shleifer A, Vishny RW. 1998. Law and Finance. *Journal of Political Economy* vol 106
- Lee, C, Ng, D. 2005. Corruption and Internal Valuation: Does Virtue Pay. *Cornell University Working Paper*
- Levine, R., and Zervos, S. 1998. Capital Control Liberalization and Stock Market Development. *World Development* 26
- Li, K. 2002. What Explains the Growth of Global Equity Markets? *Canadian Investment Review*
- Ng, David. 2006. The Impact of Corruption on Financial Markets. *Managerial Finance* vol 32 no 10
- Ng, D, Qian, K. 2004. Corruption and Corporate Governance. *Mimeo Cornell University*
- Perotti, E. C., and van Oijen, P. 2001. Privatization, Political Risk, and Stock Market Development in Emerging Economies. *Journal of International Money and Finance* vol 20
- Sharma, Subhash. 1996. *Applied Multivariate Techniques*. 1996. John Wiley and Sons, New York.
- Stocker, Marshall. 2005. Equity Returns and Economic Freedom. *Cato Journal* Vol 25
- Swaleheen, M, Stansel, D. 2007. Economic Freedom, Corruption and Growth. *Cato Journal*
- The Heritage Foundation. 2013. *Economic Freedom of the World*. <http://www.heritage.org>. December 2013

